



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
SEKRETARIAT JENDERAL

-----  
**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sofiati, SE

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS JENDERAL DPD RI**

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIRO  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO**  
NIP. 195711251983031001

**SOFIATI, SE**  
NIP. 195509181979092001

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
TAHUN 2015**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	1. Penilaian atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan	A
		2. Capaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan DPD RI	Wajar Tanpa Pengecualian
		3. Tingkat kesesuaian waktu dengan standar yang dibutuhkan untuk penyusunan dan penelaahan program dan anggaran DPD.	100%
		4. Rata-rata jumlah dokumen pertanggungjawaban anggaran yang bisa diselesaikan oleh satu orang pegawai dalam satu hari.	2 (dua) dokumen per hari
		5. Rata-rata jumlah dokumen yang diuji untuk penagihan oleh satu orang pegawai dalam satu hari sesuai dengan petunjuk teknis.	2 (dua) dokumen per hari
2.	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan pedoman tata kerja/ Non RUU DPD RI	1. Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan notulen rapat PURT DPD RI	3 (tiga) hari kerja
		2. Jumlah rancangan kebijakan PURT DPD RI tentang Anggaran dan Kerumahtanggaan DPD RI.	5 (lima) dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PURT	Rp.9.000.000.000
2. Penyusunan Perencanaan Program, Anggaran, dan Kerjasama	Rp.2.000.000.000
3. Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	Rp.2.275.000.000

Jakarta, Januari 2015

**Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Sekretaris Jenderal DPD RI**

**Pimpinan Unit Kerja,  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan**

**Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO**  
NIP. 195711251983031001

**SOFIATI, SE**  
NIP. 195509181979092001